

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Layanan Dinas PUPR Lumpuh
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Bekasi
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat / Hal.5
Edisi	: Selasa, 16 Oktober 2018

## Layanan Dinas PUPR Lumpuh

### CIKARANG, (PR).-

Setelah penyegelan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), suasana Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin (15/10/2018), lengang. Para pegawai kebingungan karena ruangannya dikunci.

Berdasarkan pantauan "PR" di lapangan, selain disegel, pintu utama yang menjadi akses menuju sejumlah ruangan di lantai I gedung Dinas PUPR turut digembok. Hanya, pengembokan tidak dilakukan KPK tetapi oleh petugas keamanan.

Di sisi lain, para pegawai tampak kebingungan lantaran ruang kerjanya

tidak dapat dimasuki. Seusai mengikuti apel, para pegawai Dinas PUPR hanya berlalu-lalang di depan kantor.

Sesekali mereka berkunjung ke beberapa rekannya di lantai II. Meskipun terdiri atas dua lantai, penyegelan di Dinas PUPR hanya dilakukan di lantai I.

Salah seorang pegawai, Adam, mengaku kebingungan lantaran ruang tempatnya bekerja digembok. "Saya juga bingung mau kerja bagaimana, pintunya digembok. Paling *ngopi* dulu di sini lihat *gimana* nanti," ucapnya. Adam merupakan staf tata usaha yang berkantor di bagian sekretariat, salah satu ruangan yang disegel.

Selain Adam, beberapa pegawai pun nampak hanya berbincang di sejumlah warung kopi yang berada di sekitar kantor. Pegawai mengaku belum menerima instruksi harus berbuat apa.

Selain pegawai yang kebingungan,

pelayanan pun lumpuh. "Kalau lantai II Bidang Bina Marga pelayanan masih aktif. Tapi kalau lantai I lumpuh karena semua ruangan terkunci," ujar pegawai di Bidang Bina Marga.

Dewi, seorang pengusaha yang hendak berkonsultasi dengan Dinas PUPR, mengaku kaget dengan penyegelan ini. "Saya datang dari Bandung sengaja mau ada yang diurus. Tapi saat ke sini ditutup," ucapnya kecewa.

### Bupati bingung

Bupati Neneng Hasanah Yasin mengaku pelayanan publik lumpuh. Namun, dia pun tidak bisa berbuat banyak lantaran kantor tempat para pegawai bekerja tengah disegel.

"Kantornya dikunci, terus bagaimana. Saya juga bingung, sebisa mungkin pegawai harus bisa kerja, tetapi kantornya ditutup pasti *stuck* dulu, enggak mungkin enggak. *Nonsense* jika saya bilang pelayanan tetap

berjalan. Pasti terbelengkalai, bohong kalau saya bilang oke, karena bagaimana oke orang masih bengong-bengong," ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Diungkapkan Neneng, ia belum bisa bekerja lebih lanjut. Meskipun demikian, rencananya Selasa ini ia bakal memanggil sekretaris daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, serta sejumlah kepala dinas untuk membahas ini.

"Sekarang Pak Sekda serta hampir 10 pejabat pada di Jakarta semua soalnya ada kegiatan SAKIP di sana. Makanya saya besok bakal minta Pak Sekda untuk inventarisasi pekerjaan mereka (pegawai PUPR) agar bisa segera bekerja," ucapnya

"Saya juga akan berkoordinasi bagaimana melangkah agar bisa berjalan, kalau diperlukan mendapatkan pelaksana tugas," katanya menambahkan. **(Tommi Andryandy)\*\*\***